

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik-praktik bisnis dengan strategi globalnya memerlukan penelaah yang mendalam bagi segi akuntansi. Karena itu dibutuhkan profesi akuntansi yang berkompeten sebagai pembuat kebijakan akuntansi. Dengan kata lain profesi akuntansi perlu senantiasa siap untuk mereview seluruh kandungan profesi baik visi, misi, strategi dan adaptasi untuk menjaga kualitas jasa peningkatan kompetensi. Profesi akuntan publik di Indonesia dianggap lebih memiliki kompetensi dibidang akuntansi dan auditing, sehingga informasi akuntansi baru dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya dengan terlebih dahulu harus melalui audit yang dilakukan oleh auditor.

Profesi akuntansi diklasifikasi menjadi empat profesi yaitu akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan perusahaan yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu, didalamnya terdapat akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi keuangan, internal auditor, dan sistem akuntansi. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja dalam suatu kantor akuntan publik kemudian akuntan pemerintah adalah akuntan yang berkerja dalam organisasi pemerintah, sedangkan akuntan pendidik adalah akuntan yang mengabdikan dirinya kepada suatu organisasi untuk mendidik dan mengajari mahasiswa dalam bidang ilmu akuntansi. Profesi Akuntan merumpuni tanggung jawab yang besar dan tetap teguh menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan. Salah satu profesi akuntan yang memiliki

tanggung jawab paling besar adalah seorang auditor. Auditor adalah salah satu bagian profesi akuntan publik yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen keuangan serta memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut. (Sihotang 2019: 09).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut auditor harus berpedoman pada standar auditing yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Selain itu auditor juga harus menjunjung tinggi kode etik akuntan publik. (Arum, 2018: 50). Selain poin-poin tersebut, beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Seorang auditor yang memiliki pemahaman atau kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang tinggi, akan mampu bertindak atau berperilaku dengan etis dalam profesinya dan organisasi. Apabila seorang auditor tidak memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, maka seorang auditor dapat melakukan hal yang menyimpang misalnya saja tidak jujur. Kecerdasan Intelektual berperan sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, namun kecerdasan emosional yang sesungguhnya (hampir seluruhnya terbukti) mengantarkan seseorang menuju keberhasilan (Goleman, 2017: 11).

Akuntan yang cerdas secara intelektual belum tentu dapat memberikan kinerja yang maksimal, namun akuntan yang cerdas secara emosional dan spiritual tentunya akan menampilkan kinerja yang lebih baik untuk KAP dimana mereka bekerja. Goleman (2017: 20) mengatakan bahwa kecerdasan emosional merujuk

pada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir dan berempati. Menurut Zohar (2019: 18) Kecerdasan spiritual/*Spiritual Quotient* (SQ) memungkinkan manusia untuk berpikir kreatif, berwawasan jauh, membuat atau bahkan mengubah aturan, yang membuat orang tersebut dapat bekerja lebih baik. SQ merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.

Amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang menurut aturan-aturan pokok perlu dijabarkan dalam Undang-Undang tentang keuangan negara. Aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan negara, seperti asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. (kemenkeu.go.id). Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampakkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pembendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu lembaga audit. Lembaga audit di Indonesia yang diamanatkan untuk memeriksa

laporan keuangan Daerah adalah lembaga audit internal (BPKP dan Inspektorat) dan lembaga audit eksternal (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau badan lainnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun Hasil yang dilakukan oleh BPK RI bukan hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian intern dan ketidaktaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Audit juga memberikan informasi terkait dengan kerugian negara/daerah yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD, (Setyaningrum, 2019).

BPK dalam pemeriksaan keuangan negara juga diberi kebebasan mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah (BPKP/Inspektorat) wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK dan BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak-pihak diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa termasuk melakukan

penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan negara saat pemeriksaan berlangsung. (Tarmizi, 2020)

Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2020 menurut Bapak Purwanto, Kepala Sub Bagian Humas bahwa kinerja pegawai di lingkungan BPK perwakilan Gorontalo dinilai cukup baik namun ada beberapa indikator yang tidak mencapai target Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) tahun 2019. Hal itu dibuktikan dengan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dilansir pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja PKPK BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Target PKPK	Realisasi
1	Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan		
	- Presentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	65%
	- Presentase penyampaian LHP	100%	100%
	- Tingkat pemenuhan permintaan perhitungan kerugian negara	100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan		
	- Tingkat implementasi strategi pemeriksaan	95%	100%
	- Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP	26%	33,33%
	- Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara		
	- Tingkat kemutakhiran data dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaaan	100%	100%
	- Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14
	- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantau Penyelesaian Kerugian Negara	100%	100%

4	Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan <i>Quality Control</i> - Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> - Ketepatan Waktu penyampaian LHP - Presentase Gugatan atas LHP 	100% 3,9 100%	100% 4,67 100%
3	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan nilai dasar BPK - Implementasi nilai dasar BPK - Tingkat Kepatuhan Pegawai 	5,00 5,00 100%	4,65 4,62 100%
4	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja 	100%	96%
5	Meningkatkan Kinerja Anggaran	80%	87%

Sumber: LAK BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat lima indikator yang tidak tercapai sesuai dengan target pada tahun 2019 yakni presentasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK, implementasi nilai dasar BPK, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja.

Penelitian tentang kecerdasan intelektual terhadap kinerja auditor pernah dilakukan oleh Pratiwi (2020) yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitan menunjukkan bahwa yaitu Kecerdasan Intelektual,

Kecerdasan Emosional, Kompetensi dan Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.

Kemudian penelitian tentang kecerdasan emosional dilakukan oleh Asadi (2018) dengan Judul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Tekanan Kerja Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik Kota Malang. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif kecerdasan emosional dan tekanan Kerja Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik Kota Malang.

Penelitian Tarmizi (2020) tentang Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Auditor Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Lampung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Lampung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak subjek maupun objek penelitian yang digunakan. Penelitian Sebelumnya ada yang menggunakan KAP sebagai objek penelitian dan auditor KAP sebagai subjek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Auditor pemerintah (eksternal) yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Perbedaan lainnya juga terdapat pada penambahan dan pengurangan variabel independen, Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu X_1 Kecerdasan Intelektual, X_2 Kecerdasan Emosional, X_3 Kecerdasan Spritual. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual Terhadap Kinerja Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Kinerja Auditor dalam menciptakan budaya integritas, independen dan profesional masih belum memenuhi target 2019, hal ini disebabkan bahwa kurangnya sosialisasi yang memadai dan pengawasan yang ketat pada auditor.
2. Pelaporan kinerja auditor masih belum sesuai target karena pelaporan masih belum lengkap sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta masih kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pelaporan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu.

1. Apakah Kecerdasan Intelektual berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
2. Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
3. Apakah Kecerdasan Spritual berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
4. Apakah Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui apakah kecerdasan spritual berpengaruh terhadap kinerja auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
4. Untuk mengetahui apakah kecerdasan inteletual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan diarahkan pada manfaat praktis dan teoritis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Akuntansi Publik dan Auditing, khususnya bagi pemahaman dan persepsi Profesi Akuntan Publik terutama Auditor Eksternal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran serta menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi profesi akuntan publik terutama auditor di BPK RI Provinsi Gorontalo dan sebagai pengembangan diri untuk mahasiswa akuntansi.